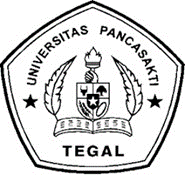
**PENERAPAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Mememenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat**

**Guna Mengajukan Skripsi Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**

**OLEH :**

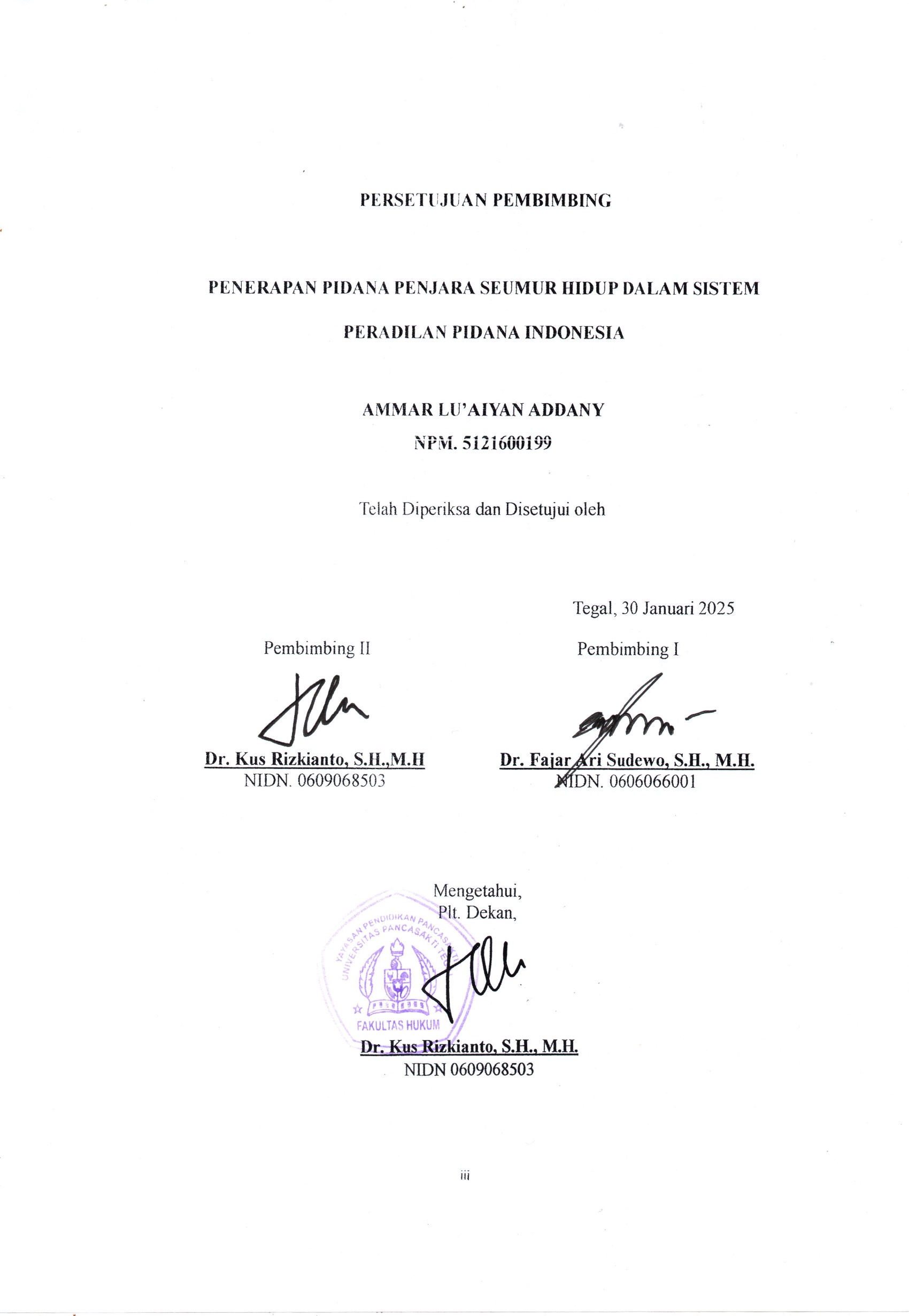
**Ammar Lu’aiyan Addany**

**5121600199**

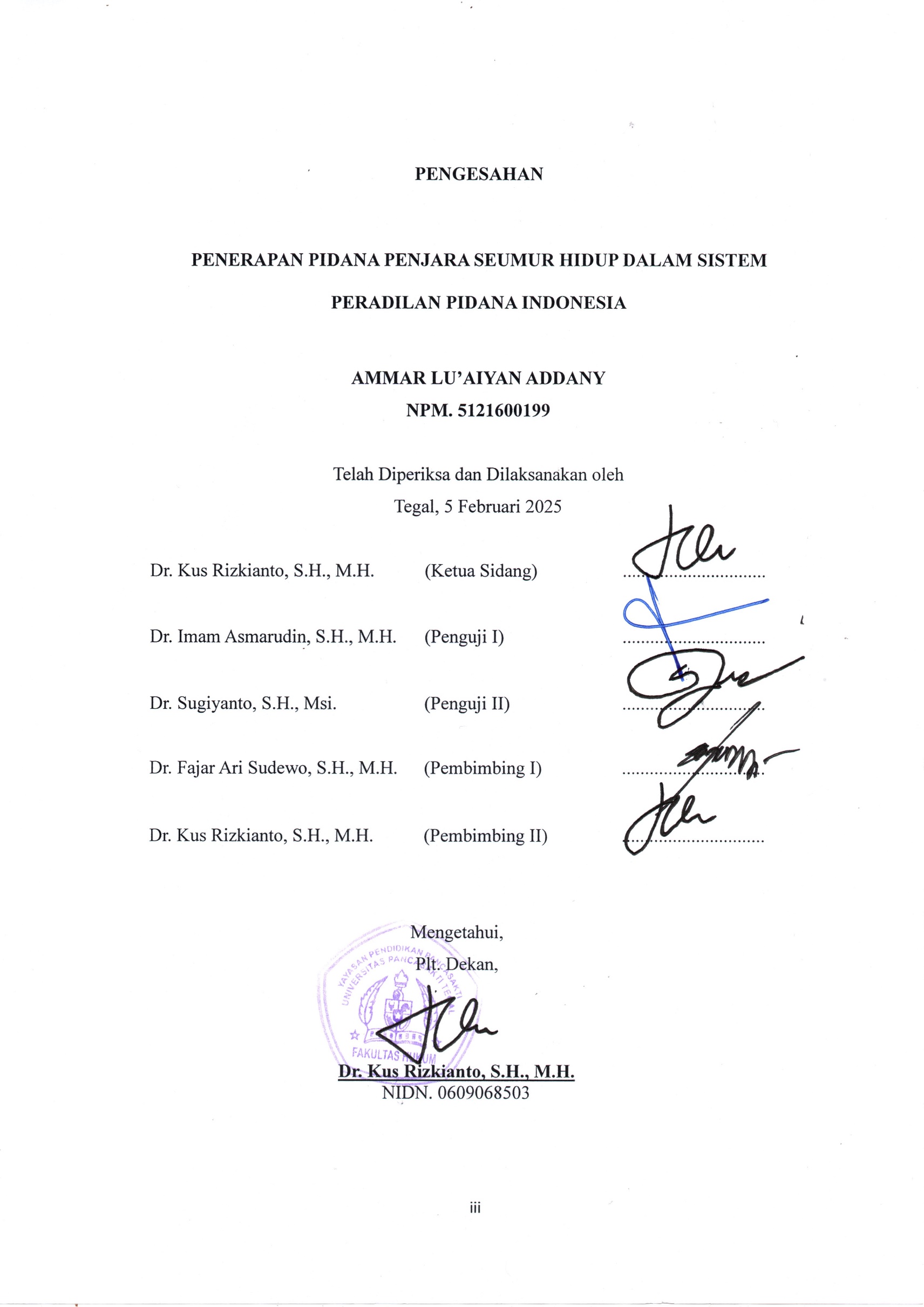
**FAKULTAS HUKUM**

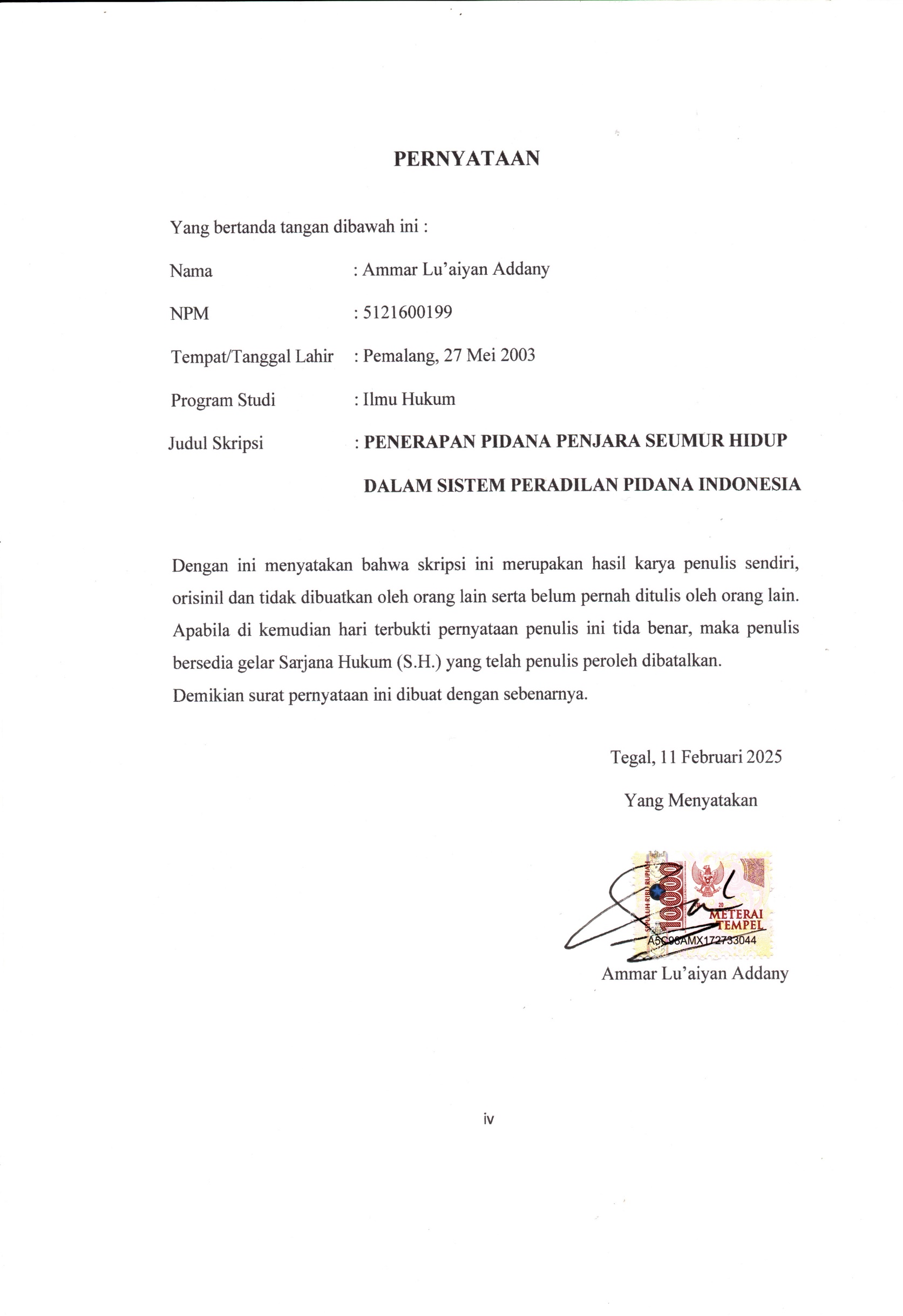
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

ii

****

****

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana penjara seumur hidup dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hukum, dasar filosofis, serta implikasi penerapannya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan reformasi penting dalam pengaturan pidana penjara seumur hidup, termasuk mekanisme pengurangan hukuman dan penekanan pada aspek rehabilitasi. Sementara itu, KUHP lama lebih bersifat retributif dengan keterbatasan dalam memberikan peluang reintegrasi sosial bagi narapidana. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pidana masih menghadapi tantangan, terutama terkait sinkronisasi antara perangkat hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana yang lebih humanis dan progresif. Namun, keberhasilan penerapan pidana penjara seumur hidup membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen penegak hukum.

**Kata Kunci: Pidana, Penjara Seumur Hidup, Sistem Peradilan Pidana.**

# *Abstract*

*This research aims to analyze the application of life imprisonment in the Indonesian criminal justice system based on the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code. The main focus of this research is to compare legal arrangements, philosophical bases, and the implications of their application for the principles of justice and protection of human rights. The research method used is the library research method with a normative approach. Data sources were obtained from legal literature, statutory regulations, and other relevant documents. The research results show that the new Criminal Code introduces important reforms in the regulation of life imprisonment, including sentence reduction mechanisms and an emphasis on rehabilitation aspects. Meanwhile, the old Criminal Code was more retributive in nature with limitations in providing opportunities for social reintegration for prisoners. Nevertheless, the implementation of criminal policy still faces challenges, especially regarding synchronization between legal instruments and judicial practices. This research concludes that the differences in regulations between the old Criminal Code and the new Criminal Code reflect a change in the criminal law paradigm that is more humane and progressive. However, the successful implementation of life imprisonment requires a strong commitment from all elements of law enforcement.*

***Keywords: Criminal, Life Imprisonment, Criminal Justice System.***

# MOTTO

*Fight Hartred With a Smile*

*“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, maka keajaiban pun tercipta.”*

(Matt Crance)

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasullulah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah Swt. karena hanya atas izin dan karunianyalah maka Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta ayahanda Slamet Haryanto dan ibunda Indah Khikmawati yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do’a yang tiada henti dilangitkan untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Diriku sendiri Ammar Lu’aiyan Addany yang telah mampu melewati segala rangkaian dalam meyelesaikan pendidikan strata 1, semoga hal-hal baik selalu menyertai dalam tiap langkah yang akan dihadapi selanjutnya.
4. Adik penulis tercinta Lia Farah Diza dan Ashila Hasanatul Istiadzah yang selalu memberikan do’a, dukungannya.
5. Nurul Ismaeni support system penulis yang selalu setia menemani, memotivasi dan memberikan doa yang terbaik kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Miftakhul Umam alias klomoh yang setia menyediakan wifi, kopi, dan motivasi kepada penulis.
7. Egen Bayu Kusuma teman yang selalu menjadi rival seperjuangan dalam mengerjakan skripsi dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Andre Verdian rekan musik sefrekuensi yang selalu memotivasi penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Rekan-rekan kelas D yang selalu memotivasi dan memberikan semangat, dan doa kepada penulis.
10. Rekan-rekan angkatan 21 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
11. *What looks beautiful, doesn't necessarily mean it's the same inside. What looks great, may not actually be great. No need to admire too much, you could be greater than him. Life will never feel fair if you still compare your life with other people. Last but not least, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work, I want to thank me for having no days off, I want to thank me for never quittig, I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive.*

Tegal, 30 Januari 2025

Penulis

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasullulah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Waki Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Selviany, S.E., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
10. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
11. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
12. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 30 Januari 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

**PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN…………………………………………...ii**

**PENGESAHAN……………………….....………………………………………iii**

**PERNYATAAN………………………………………………………………….iv**

**ABSTRAK v**

***Abstract* vi**

**MOTTO vii**

**HALAMAN PERSEMBAHAN viii**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xii**

**BAB I 1**

**PENDAHULUAN 1**

**A. Latar Belakang 1**

**B. Rumusan Masalah 8**

**C. Tujuan Penelitian 8**

**D. Urgensi Penelitian 8**

**E. Tinjauan Pustaka 9**

**F. Metode Penelitian 11**

**1. Jenis Penelitian 11**

**2. Pendeketan Penelitian 12**

**3. Data Penelitian 13**

**4. Metode Pengumpulan Data 15**

**5. Metode Analisis Data 16**

**G. Sistematika Penulisan 17**

**BAB II 19**

**TINJAUAN KONSEPTUAL 19**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 19**

**1. Pengertian Tindak Pidana 19**

**2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 21**

**3. Pemidanaan 24**

**B. Tinjauan umum tentang Ruang Lingkup Hukum Pidana 28**

**C. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana 52**

**BAB III 60**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60**

**A. Pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup di Indonesia 60**

**B. Praktik Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia 73**

**BAB IV 80**

**PENUTUP 80**

**A. Kesimpulan 80**

**B. Saran 81**

**DAFTAR PUSTAKA 83**

**Website: 86**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Hukum pidana dapat didefinsikan secara konseptual sebagai keseluruhan Undang-Undang yang mengatur dasar perbuatan terlarang, penentuan pemidanaan bagi pelaku, pengenaan sanksi, dan prosedur pelaksanaan pidana. Menurut pakar hukum pidana, ada sejumlah metode yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan dalam hukum pidana. Seperti keadilan restoratif, dialog dan mediasi serta partisipan masyarakat dalam mendukung pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial. Pidana penjara, menurut hukum pidana Indonesia, adalah jenis sanksi pidana yang membatasi kebebasan bergerak terpidana.[[1]](#footnote-1)

Penjara adalah pidana pokok, menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dapat dikategorikan sebagai pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan, menurut undang-undang kolonial. Selain itu, pelaksanaan pidana penjara perlu dievaluasi ulang sebagai akibat dari pergeseran perspektif tentang pemidanaan dari retributif ke restoratif.

Restoratif adalah Pendekatan yang melibatkan dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil, dengan tujuan memberdayakan semua pihak yang terlibat. Agar implementasi dan penerapan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.[[2]](#footnote-2)

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sifat ini berasal dari prinsip pemidanaan retributive yang berlaku pada waktu itu. Teori retributif menyatakan bahwa pidana diberikan karena orang yang melakukan kesalahan harus menerima konsekuensi dari tindakannya.

Pidana harus menjadi kompensasi yang adil untuk kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Dijelaskan bahwa jika seseorang terbukti melakukan suatu pelanggaran, maka individu yang melakukan pelanggaran layak diberikan hukuman. Pelaku pelanggaran memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilanggarnya, menurut hukum. Sering kali interaksi manusia dengan hukum menimbulkan masalah hukum, termasuk dalam ranah hukum pidana.[[3]](#footnote-3) Dasar hukum pidana adalah adanya suatu kejahatan, karena setiap kejahatan pasti ada pidananya. Pemidanaan terpidana dilakukan dengan tujuan menjaga masyarakat tertib, menjerakan atau membuat terpidana tak berdaya lagi, dan membantu mereka memperbaiki diri sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.[[4]](#footnote-4)

Ada dua jenis hukuman penjara, yaitu pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu, yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Jenis pidana penjara yang menarik untuk dikaji adalah pidana penjara seumur hidup. Penjara dimulai pada akhir abad ke-18 karena individualisme dan gerakan perikemanusiaan sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana baru. Penjara menjadi lebih penting daripada tempat pidana mati dan pidana badan yang kejam.[[5]](#footnote-5)

Umumnya masyarakat mengartikan pidana penjara seumur hidup sebagai pidana penjara seumur hidupnya pelaku. Pidana penjara seumur hidup, yang kemudian dikenal sebagai "pidana seumur hidup saja", mengandung banyak aspek paradoksal yang sering diperdebatkan oleh para ahli hukum.[[6]](#footnote-6) Tidak adanya batasan pada pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan bagi orang awam hukum dalam penafsirannya. Kedudukan pidana seumur hidup masih ada dalam sistem pemidanaan Indonesia, tidak berarti bahwa masyarakat menerima pidana seumur hidup tanpa syarat. Banyak orang menentang hukuman seumur hidup karena dianggap bertentangan dengan konsep pemasyarakatan, yaitu bahwa orang yang dihukum tidak akan memiliki harapan lagi untuk kembali ke masyarakat.

Pasal 12 KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang pidana seumur hidup, secara teoritis, pidana seumur hidup dianggap sebagai pidana selama hidup atau sepanjang hidup. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, dari perspektif penjatuhan pidana dan terpidana, pidana seumur hidup adalah hukuman yang pasti *(definite sentence)* karena terpidana dikenakan jangka waktu yang jelas *(a definite period of time)*. Ini berarti bahwa terpidana akan menjalani hukuman penjara selama hidupnya.[[7]](#footnote-7) Pidana penjara seumur hidup juga dikaitkan dengan pidana kedua, yaitu sebagai alternatif untuk tindak pidana yang pidana maksimumnya adalah hukuman mati.

Salah satu jenis pidana yang dapat pilih untuk diterapkan adalah penjara seumur hidup. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku kejahatan yang dianggap telah melakukan tindak pidana sangat serius dan tidak memungkinkan pembebasan sampai akhir hidup mereka, atau dalam beberapa kasus, pembebasan bersyarat yang sangat terbatas. Saat ini, perlindungan hukum yang lebih mendalam dalam proses analisis dan pelaksanaan hukuman dalam sistem peradilan pidana sedang diperhatikan.

Sistem hukum di Indonersia berkaitan dengan hukum pidana yang ada. Awal mula pemberlakuan *Wertboerk Van Straftrercht* pada masa pemerintah kolonial Belanda yang diundangkan pertama kali pada tahun 1886 yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahurn 1946 pasca kemerdekaan Indonersia untuk menutupi kekosongan hukum pidana pada waktu itu. Selanjutnya dilegalkan untuk berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 tahurn 1958 yang berlaku sampai tahun 2023. *Wertboerk Van Straftrercht* kemudian digantikan eksistensinya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[[8]](#footnote-8)

Definisi pidana penjara seumur hidup diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Berdasarkan undang-undang baru, hukuman penjara bisa lama atau pendek, maksimal 15 tahun atau minimal satu hari, kecuali ada persyaratan minimum khusus. Jika pilihannya antara hukuman mati dan penjara seumur hidup, atau hukumannya ditambah menjadi 15 tahun, maka pidananya bisa menjadi 20 tahun. Pidana penjara seumur hidup mencerminkan seriusnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, seperti tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkoba dalam jumlah besar, kejahatan seksual berat, dan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa sederet kasus yang dijatuhkan ke dalam pidana penjara seumur hidup. Kasus pertama adalah Ferdy sambo yang pada saat itu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan merenggut nyawa polisi Brigarir Nofriansyah Hutabarat. Kasus Ferdy Sambo ini merujuk kedalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, penjara seumur hidup merupakan pidana pokok dengan sansi terberat. Peraturan ini, yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang, akan menggantikan hukuman mati, ketentuan pidana pokok terberat dalam KUHP lama.[[9]](#footnote-9)

Kasus kedua adalah Ali Imron, yang terlibat dalam tindak pidana terorisme pada tanggal 12 Oktober 2002. Hakim Pengadilan Negeri Bali menghukum Ali Imron bin H Nurhasyim, juga dikenal sebagai Alik, dengan hukuman seumur hidup. Karena perannya dalam ledakan bom yang membunuh 202 orang di Bali, termasuk 88 warga Australia, dia dihukum penjara seumur hidup. Ali Imron membuat alat dan menanam bom di luar Konsulat AS di Bali, melatih para penyerang untuk meledakkan rompi bunuh diri dan van yang sarat dengan bahan peledak.[[10]](#footnote-10)

Kasus ketiga adalah Akil Mochtar, seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Terbukti bersalah atas penggunaan hadiah dan pencucian uang dalam kasus sengketa Pilkada di MK. “Menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa,” seperti yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim Suwidya di Pengadlan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada Senin, 30 Juni 2014.[[11]](#footnote-11)

Kasus ke empat adalah Vina Cirebon 2016, Pada Sabtu, 27 Agustus 2016 delapan tahun lalu, Kawanan geng motor membunuh dan memperkosa Vina yang berusia 16 tahun di depan kekasihnya. Muhammad Rizky, yang juga dikenal sebagai Eki. Setelah Vina tewas, kawanan geng motor juga membunuh Rizky. Film horor yang diangkat dari kisah pilu Vina, Vina:” *Before 7 Days*”, yang dirilis di bioskop Tanah Air pada Rabu, 8 Mei 2024, membuat nama dan identitas pelaku kembali menjadi perhatian publik. Pasangan itu meninggal di dekat SMP Negeri 11, Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pada Minggu, 28 Agustus 2016, jasad Vina dan Eki ditemukan. olda Polres Cirebon Kota menangani kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina. Setelah beberapa penyidikan menyeluruh, polisi menemukan bahwa sebelas orang adalah pelaku pembunuhan. Delapan pelaku menerima hukuman, tujuh di antaranya menerima hukuman penjara seumur hidup. Jaya berusia 23 tahun, Supriyanto 20 tahun, Eka Sandi berusia 24 tahun, Hadi Saputra berusia 23 tahun, Eko Ramadani berusia 27 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana berusia 21 tahun. Saka Tatal, seorang pelaku lainnya yang masih di bawah umur, menerima hukuman delapan tahun penjara. Hingga saat ini, tiga pelaku lainnya masih diburu. Identitas tiga pelaku tersebut diumumkan kepada publik pada Selasa, 14 Mei 2024, oleh Kantor Polisi Jawa Barat.[[12]](#footnote-12)

Hal ini menyangkut tentang tujuan pemidanaan, proses pengaturan, dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut merngenai pengaturan dan pelaksanaan pidana penjara seumur hidup di Indonesia.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana penjara seumur hidup di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan pidana penjara seumur hidup di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pidana seumur hidup di Indonesia
2. Untuk mengkaji penerapan pidana seumur hidup di Indonesia.

## Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan melihat penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia sangat tingggi mengingat beberapa faktor seperti kepastian hukum, asas hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas dan transparan bagi semua subjek hukum. Sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada dan menghindari sewenang-wenangnya negara dalam menjalankan kekuasaan.[[13]](#footnote-13) Banyak orang salah memahami bahwa pidana penjara seumur hidup seharusnya dijalani hingga meninggal, bukan sesuai dengan usia terpidana saat divonis.

Pidana ini sering menjadi alternatif bagi pidana mati, sehingga penting untuk mengevaluasi bagaimana penerapannya dan dampak dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini juga dapat membantu merumuskan terkait penerapan pidana seumur hidup dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif serta untuk mengevaluasi kesesuaian pidana penjara seumur hidup dengan tujuan hukum modern.

## Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan pidana seumur hidup di Indonesia, yaitu:

1. Henny C. Kamea, Judul Jurnal : ”Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana dan rumusan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia.[[14]](#footnote-14) Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji pengaturan hukuman pidana seumur hidup dalam hukum pidana di Indonesia. Perbedaannya penulis mengkaji lebih dalam tentang hukuman pidana seumur hidup dalam regulasi/ peraturan pidana di Indonesia.
2. Ikhwan Nur Mustofa (2012), skripsi berjudul : Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.[[15]](#footnote-15) Persamaan dalam penelitian tersebut sama sama mengkaji tentang pidana seumur hidup di Indonesia, perbedaannya pada sudut pandang dan variabel yang digunakan, skripsi ini menggunakan hukum islam sedangkan penulis menggunakan perspektif peraturan pidana di Indonesia yang mencakup beberapa aspek yaitu ; sistem hukum pidana, sumber hukum pidana (KUHP, undang-undang nomor 1 tahun 2023, undang undang pidana khusus diluar Kuhp, dan Yurisprudensi), bentuk pidana, sanksi pidana tambahan, asas-asas hukum pidana, dan pembagian hukum pidana (hukum pidana formil dan hukum pidana materil).
3. Dwi Ade Surya (2022), skripsi berjudul : Efektifitas Penerapan Pidana Seumur Hidup Terhadap Nilai - Nilai Kemanusiaan. Dalam skripsi ini mengaji tentang efektifitas penerapan pidana penjara seumur hidup di Indonesia hampir selalu menjadi alternatif dari pidana mati, dan pidana seumur hidup dalam hukum pidana di Indonesia hendaknya lebih manusiawi serta tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya.[[16]](#footnote-16)

Perbedaan dalam penelitian ini adalah skripsi tersebut mengkaji tentang efektifitas pidana penjara seumur hidup terhadap nilai-nilai kemanusiaan sedangkan skripsi penulis mengkaji penerapan pidana seumur hidup dalam perspektif peraturan pidana di Indonesia dan perbedaan sudut pandang antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis.

1. Syachdin,SH (2009), Tesis berjudul : “Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional”. Tesis ini menjelaskan tentang kedudukan dan pengaturan pidana seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) diatur dalam susunan pidana (stelsel pidana) pada pasal 10 KUHP, akan tetapi pidana seumur hidup dicantumkan dalam pasal 12 KUHP ayat (1) KUHP dan dalam kedudukan pengaturan pidana seumur hidup diluar KUHP menggunakan sistim alternatif kumulasi.[[17]](#footnote-17)

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Tesis ini mengkaji tentang kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem pidana nasional dan pada rumusan masalah membahas tentang bagaimana formulasi pidana seumur hidup dalam sistim hukum nasional yanag akan datang, sedangkan penulis hanya mengkaji tentang penerapan hukuman seumur hidup diindonesia dalam perspektif peraturan pidana di Indonesia.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[[18]](#footnote-18) Penelitian yang memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam arti yang lebih sempit, penelitian yang menggunakan data sekunder dan data penelitian dapat dikses melalui penelusuran dokumen.[[19]](#footnote-19) Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada disebut data sekunder.[[20]](#footnote-20)

Penelitian ini berfokus pada literatur (kepustakaan), yaitu buku-buku, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen (cetak dan elektronik), sehingga penulis dalam mengkaji lebih lanjut tentang rumusan-rumusan masalah dalam penelitiannya dapat menemukan jawaban.

### Pendeketan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif mencakup *statute approach, case approach, historial approach, comparative approach,* dan *conceptual approach.* Penelitian tentang prinsip-prinsip hukum yang positif dan asas hukum dilakukan melalui penilaian prinsip-prinsip hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang melihat masalah hukum secara normatif, (apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan menurut hukum yang berlaku).[[21]](#footnote-21). Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan undang-undang *(statute approach)* yang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis cenderung lebih kepada pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menambah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang diteliti.[[22]](#footnote-22)

### Data Penelitian

Data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dikenal sebagai data sekunder. Karena peneliti tidak mendapatkan data secara langsung, peneliti bertindak sebagai pihak kedua. Sugiyono menggambarkan sumber data sekunder sebagai sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui dokumen atau orang lain. Sumber data sekunder berfungsi sebagai sumber data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperlukan oleh data sekunder.[[23]](#footnote-23)

Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, dalam mengolah dan menganalisis penelitian ini penulis mengutamakan penelitian kepustakaan *(library research)* sebagai sasaran utama dalam menyusun penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai data sekunder, meliputi :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi sebegai berikut :
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP baru)
5. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.[[24]](#footnote-24) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum pimer, yaitu meliputi:
6. Penjelasan undang-undang, literatur, studi kepustakaan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
7. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.
8. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.[[25]](#footnote-25) Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:
9. Kamus Hukum
10. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
11. Penjelasan Perundang-undangan
12. Indeks Majalah Hukum

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Studi Literatur, merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Penulis mempelajari buku-buku serta artikel baik disurat kabar ataupun artikel-artikel pada sarana elektronika yaitu melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumen, merupakan penelitin yang mengumpulkan dokumen-dokumen online maupun offline sebagai alat bukti yang akurat dari pencacatan sumber informasi dari data primer maupun sekunder.
3. Akses internet, merupakan cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan mengakses *website-website*, *jurnal online,* dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interaktif. Metode kualitatif sendiri adalah metode analisis data yang bersifat deskriptif karena menggunakan kata-kata, catatan lapangan, bahan – bahan hukum. Sehingga pada penelitian ini dapat mengacu pada penerapan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dimasyarakat terhadap penerapan hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang menjadi rumusan masalah pada penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan/ menjelaskan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pidana penjara seumur hidup di Indonesia.

### G. Sistematika Penulisan

Rencana pelaporan pada penelitian ini disusun dalam empat bab yang memiliki hubungan atau korelasi pada setiap masing - masing bab. Empat bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, tujuan penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan pada penelitian, tinjauan pustaka untuk membantu memperoleh literatur yang terkait topik penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

**Bab II Tinjauan Konseptual.** Bab ini akan menjelaskan hal - hal dasar yang merupakan fondasi dari alasan penelitian dibuat. Hal ini mencakup definisi, konsep, dan argumentasi yang kuat untuk mengaitkan dan mengkorelasikan ilmu pengetahuan dan keterkaitan dalam permasalahan yang dibuat dalam penelitian, seperti ruang lingkup pidana, dan pidana pokok.

**Bab III Hasil Dan Penelitian.** Pada bab ini akan memuat hasil dan pembahasan yang telah dibuat pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, ditunjukan untuk mengetahui penjabaran secara detail mengenai penelitian. Pada bab ini berisi kumpulan data yang disajikan sebagai penguat pemaparan hasil dan pembahasan terkait penelitian, yaitu pengaturan pidana penjara seumur hidup dan penerapan pidana seumur hidup di Indonesia.

**Bab IV Penutup.** Bab ini akan memuat pemaparan mengenai kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan pada penelitian dapat dikemukakan secara ringkas. Hal ini merupakan hasil akhir dari penyajian dan pemaparan data yang telah disajikan pada pembahasan bab sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat saran dan solusi bertujuan mengenai pendapat dari sudut pandang.

# 

# 

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bila ada yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP. Pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian, korupsi, penggelapan dan pencemaran nama baik.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yakni, *strafbaarfeit*. Didalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf,* *Baar*, dan *Feit.* *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh, dan *Feit* sebagai; tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran, dan perbuatan. Sedangkan didalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. [[26]](#footnote-26) Meskipun istilah *strafbaar feit* atau yang lebih sering di dengar di Indonesia sebagai tindak pidana atau delik tidak memiliki

penjelasan resmi tentang arti yang sesungguhnya, akan tetapi beberapa pakar mencoba memberikan definisi tentang istilah *strafbaar feit*:

1. Menurut Simons, strafbaar feit adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang disengaja atau tanpa disengaja oleh seseorang yang perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum.[[27]](#footnote-27)
2. Menurut Pompe, strafbaar feit adalah suatu tindakan yang, berdasarkan rumusan undang-undang, dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum.[[28]](#footnote-28)
3. Doktor W.L.G Lamaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut: Hukum pidana adalah sistem peraturan yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Ini karena hukum pidana terdiri dari peraturan yang berisi keharusan dan larangan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk digunakan sebagai sanksi, yaitu penderitaan yang yang bersifat khusus.[[29]](#footnote-29)

Berdasarkan uraian para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.[[30]](#footnote-30)

### Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara singkat, hukum pidana terdiri dari kumpulan peraturan dan larangan atau kewajiban, yang pelanggarannya dapat diancam dengan sanksi. Unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidana nya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility / liability*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.[[31]](#footnote-31)

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut E. Mezger, Unsur - unsur tindak pidana meliputi ;

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam Pidana

Lamintang membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada pada si pelaku atau hubungannya dengan si pelaku, termasuk segala sesuatu yang dia pikirkan. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan si pelaku harus dilakukan.[[32]](#footnote-32)

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

* Maksud pada suatu percoban
* Merencanakan terlebih dahulu
* Kesengajaan atau ketidaksengajaan
* Macam macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

* Kualitas dari sipelaku
* Sifat melanggar
* Kasualitas, artinya hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan dalam hal tindak pidana, unsur subjektif termasuk niat, maksud atau tujuan, kesengajaandan ketidaksengajaan, serta kemampuan bertanggungjawab. Unsur objektif termasuk perbuatan, akibat, dan keadaan.

### Pemidanaan

Pemidanaan adalah proses hukum yang melibatkan penjatuhan sanksi terhadap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.[[33]](#footnote-33)

Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum seseorang, tetapi juga untuk membantu mereka rehabilitasi dan mencegah mereka melakukan tindak pidana lagi. Pemidanaan dapat didefinisikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Istilah "pidana" merujuk pada hukum, sedangkan "pemidanaan" mengacu pada tindakan menghukum pelaku kejahatan.[[34]](#footnote-34) Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan orang bersalah tanpa ada konsekuensi yang pasti untuk kesalahannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesalahan sangat memengaruhi pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Dalam kasus dimana kesalahan dianggap sebagai "dapat dicela", pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.[[35]](#footnote-35)

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil, Ada beberapa teori tentang sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil:

#### Teori Absolut atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Menurut teori ini, dasar pemidanaan harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban dan dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena tindak pidana itu menyebabkan penderitaan bagi korbannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk menimbu pelaku tindak pidana dan menimbu korbannya. Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa; “Adanya atau terjadi kejahatan adalah dasar pembenaran pidana karena pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.”[[36]](#footnote-36)

Teori absolute ini tidak mempertimbangkan cara pelaku kejahatan dididik, karena mereka juga memiliki hak untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan martabat dan harkat mereka.

#### Teori Relatif atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Menurut teori ini, yang dianggap sebagai dasar hukum pemidanaan adalah bukan pembalasan, tetapi tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, hukuman didasarkan pada maksud dan tujuan pidana, yang berarti teori ini mencari manfaat dari pemidanaan. Teori ini juga dikenal sebagai teori nisbi, yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaatnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan: “Pidana dijatuhkan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan, bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau kompensasi kepada orang yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut teori utilitarian. Menurut teori ini, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya: pidana dijatuhkan bukan *"quia peccatum est"* (karena orang membuat kejahatan) tetapi *"Ne Peccetur"* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).[[37]](#footnote-37)

Teori relatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketertiban masyarakat tidak terganggu. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif dibagi menjadi dua jenis pencegahan: umum dan khusus. Konsep pemidanaan dalam KUHP lama didasarkan pada prinsip retributif, yang berarti bahwa hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Tidak ada penekanan atau pencegahan, dan pedoman pemidanaan yang tidak jelas, sehingga hakim berbeda-beda dalam memahaminya. Selain itu, sistem ini seringkali rigid dan tidak dapat disesuaikan untuk menyesuaikan hukuman dengan kemajuan pelaku.

Pemidanaan dalam KUHP baru mengintroduksi pendekatan yang lebih progresif dan manusiawi, berfokus pada keadilan restoratif. Diatur dalam pasal 51-52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (tujuan pemidanaan), terdapat empat tujuan pemidanaan yaitu ; pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, rehabilitasi terpidana, dan penumbuhan rasa penyesalan.[[38]](#footnote-38)

Dapat dilihat dari pernyataan diatas, bahwa pemidanaan dalam KUHP baru bukan semata-mata untuk menghukum atau upaya balas dendam. Tetapi lebih menekankan pentingnya variable tujuan pemidanaan yang menggantikan dari pada KUHP lama yang menggunakan pendekatan retributif. Dengan demikian pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan dan melindungi hak asasi manusia.[[39]](#footnote-39)

## Tinjauan umum tentang Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup hukum pidana terbagi atas dua, yaitu *ius poenali* dan *ius puniendi*. *Ius puniendi* dan *ius poenali* adalah dua bagian dari ruang lingkup hukum pidana. Ius puniendi adalah hak memidana, dan *"ius"* dalam bahasa latin berarti baik hak maupun hukum. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa ada dua cara untuk melihat hukum pidana:

1. Hukum pidana dalam arti subjektif *(ius puniendi)*

Hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang diatur oleh hukum pidana dalam arti subjektif, atau ius puniendi.

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenali*)

Pengertian hukum pidana dalam arti objektif juga dikenal sebagai "ius poenali", adalah kumpulan peraturan yang mencakup larangan-larangan atau keharusan yang diancam dengan hukuman jika melanggarnya. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil adalah dua bagian dari undang-undang poenali sapat.

* Hukum pidana materil membahas siapa yang dapat dihukum, apa yang dapat dihukum, dan perbuatan apa yang bertentangan dengan undang-undang.
* Hukum pidana formil adalah kumpulan undang-undang yang menentukan bagaimana negara menggunakan haknya untuk menerapkan hukuman.[[40]](#footnote-40)

Aturan hukum pidana berlaku bagi tiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Asas Teritorialtas (*territorialiteits beginsel*)

Asas ini juga diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.”

1. Asas Nasionalitas aktif

Diatur dalam Pasal 6 KUHP bahwa warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, kecuali jika kejahatan tersebut dilakukan di negara asing yang telah menghapus hukuman mati.

1. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Setiap negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan hukum atau kepentingan nasionalnya, menurut dasar pemikiran asas perlindungan. Ciri utamanya adalah subjeknya mencakup setiap orang, tidak terbatas pada warga negara saja, dan tidak peduli di mana mereka berada; itu adalah tindakan yang dianggap sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia dan harus dilindungi. Kepentingan nasional mencakup;

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan Negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan martabat kepala Negara
2. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan
3. Keamanan Perekonomian
4. RI;Keamanan ideologi negara, pancasila dan haluan Negara
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan
6. Asas universalitas (*universaliteits beginsel*)

Asas universal menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut oleh undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum global. Asas ini berpendapat bahwa hukum pidana berlaku secara global, melampaui batas wilayah dan individu yang dilindungi. Menurut prinsip ini, jenis kejahatan yang dimasukkan ke dalam pidana sangat berbahaya bagi kepentingan Indonesia dan dunia. Semua pelanggaran ini harus dicegah dan diberantas.

1. Asas-asas Hukum Pidana Menurut waktu (Asas Legalitas) :Secara Hukum Asas legaliatas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: ”*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata straf, kata straf, yang mana biasa disebut dengan istilah hukuman. Namun, istilah pidana lebih tepat digunakan daripada istilah hukuman, karena hukum secara umum merupakan terjemahan dari kata recht. Soedarto menyatakan bahwa nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana) tidak lain dimaksudkan untuk membuat orang itu jera. Untuk mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum, hukum pidana sengaja membuat orang menderita. Hukum ini berbeda dari hukum lain karena sanksi yang tegas. Karena itu, jika sanksi atau upaya lain tidak memadai, hukum pidana harus dianggap sebagai opsi terakhir.[[41]](#footnote-41)

Pidana merupakan salah satu perwujudan dari fungsi hukum pidana yang menjadi tujuan dari pidana itu sendiri, tujuan pidana adalah untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di masa depan serta upaya untuk menghindari atau menghentikan tindak pidana. fungsi hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Fungsi umum hukum pidana, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya

Dapat diketahui bahwa ada keyakinan umum bahwa fungsi hukum pidana berupa pera turan atau aturan yang menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana, dan akibat atau sanksi yang diberikan sebagai tanggapan atas perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Salah satu fungsi hukum pidana adalah memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana melalui alat-alat negara dalam menjaga ketertiban masyarakat.

1. Pidana Pokok

Pidana adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai konsekuensi dari tindak pidananya. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan jenis pidana umum. Pidana Pokok terdiri dari beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana pokok tersebut antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Masing-masing jenis pidana ini memiliki perbedaan dalam hal jangka waktu pelaksanaan serta dampaknya terhadap pelaku, dan diterapkan sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

1. Pidana Mati

Pidana mati didefinisikan sebagai penjatuhan hukuman yang mencabut hak hidup seseorang. Dalam hukum, uitvoering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman mati. Hukuman mati, juga dikenal sebagai pidana mati, yaitu penahanan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk hidup.[[42]](#footnote-42) Dalam situasi di mana nilai-nilai HAM dapat mempengaruhi keputusan untuk menjatuhkan pidana mati, Pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[[43]](#footnote-43)

Pidana mati dalam konteks KUHP lama dianggap sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang sangat serius, dan pelaksanaannya diatur untuk mencerminkan sikap tegas terhadap pelanggaran hukum yang berat. Dengan kata lain, pidana mati adalah yang paling berat dari semua jenis pidana. Berbicara tentang pidana mati, pastilah dekat dengan makna kematian dan mati. Perbedaan pendapat yang sangat berbeda dapat muncul dari sana. Kaum jahiliyah, atau kaum sekuler, percaya bahwa kematian adalah akhir dari semua hal. Bagi mereka, kelahiran adalah awal dan kematian adalah akhir. Fokus utama dalam teologi mereka adalah "tujuan menghalalkan segala cara".[[44]](#footnote-44) Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka takut melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan hukuman mati. Dengan demikian, hukuman mati dilaksanakan di muka umum pada zaman dahulu.

Cerita yang menggambarkan peristiwa di Prancis selama revolusi pada penghabisan abad ke-18, di mana beberapa orang dihukum mati di lapangan di depan umum dengan menggunakan *guillotine*, yaitu benda tajam berat yang dijatuhkan ke leher seseorang. Namun, mungkin karena rasa takut melihat guillotine jatuh di leher orang, banyak orang pada abad ke-19 menentang hukuman mati.

Menurut tulisan Roeslan Saleh, S.H, yang diterbitkan dalam majalah Hukum dan Masyarakat tahun 1960, nomor 3-4-5-6, halaman 165 dan seterusnya, hukuman mati dihapus secara berurutan pada tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Marino, 1848 di Venezuela, 1852 di Rhode Island, 1853 di Wiscounsin, 1959 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithania, 1926 di Uruguay.[[45]](#footnote-45) Beberapa Negara tersebut kemudian kembali memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati hanya berlaku untuk peradilan pidana sipil di Belanda. Namun, peradilan militer masih mengenal hukuman mati untuk kejahatan berat dengan syarat bahwa, menurut pendapat hakim keamanan Negara, hukuman mati harus dijatuhkan pada kejadian tertentu.

Tahun 1952, undang-undang Belanda tentang hukum pidana pada waktu perang, atau oorlogs-strafrecht, menetapkan hukuman mati untuk kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau yang hanya merupakan tindak pidana pada waktu perang. Selain itu, ditemukan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan dengan suara bulat para hakim, dan tidak lagi jika hakim keamanan Negara memintanya. Menurut Mr. J.E. Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indie Strafstelsel*, halaman 11, dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, "Negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajibannya", kata Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda.[[46]](#footnote-46)

Meskipun ada banyak orang yang tidak setuju dengan hukuman mati, dipertahankan didukung sebagai suatu noodrecht (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat dan harus dimusnahkan secara radikal untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa mayoritas penduduk asli Indonesia, serta orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India, takut akan dibunuh secara kekerasan. Akibatnya, ancaman hukuman mati, baik dari sudut pandang "prevensi umum" maupun "prevensi khusus", diharapkan dapat mencegah kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.

Orang-orang umumnya tidak setuju dengan hukuman mati karena fakta bahwa keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi jika kemudian terbukti bahwa keputusan itu didasarkan pada kekeliruan atau informasi yang ternyata salah. Akan tetapi, sepertinya kekeliruan ini jarang terjadi karena para hakim pasti sangat berhati-hati saat menjatuhkan hukuman mati. Berbeda dengan itu, hukuman mati mungkin masih diperlukan di Indonesia sebagai sarana untuk mencegah orang-orang yang tidak melakukan kejahatan berat.[[47]](#footnote-47)

Hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. Perubahan status pidana mati, pidana mati bukan lagi pidana pokok didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Pidana mati tidak lagi dianggap sebagai pidana utama, melainkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, seperti penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun[[48]](#footnote-48)

Berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang, pidana mati akan diterapkan bersamaan dengan pengaturan masa percobaan, seperti diatur dalam Pasal 100 dan 101 KUHP. Perubahan ini adalah hasil dari upaya untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk hidup.

1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Hukuman ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang dengan cara mengurungnya di dalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, bahkan bisa seumur hidup. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk memerangi kejahatan adalah penjara. Pada akhir abad ke-18, pidana penjara digunakan sebagai sarana untuk menghukum pelaku tindak pidana baru karena paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan. Ini semakin penting dan menggantikan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam. Penjara telah menjadi dilema dalam hal pidana penjara, dengan peristiwa yang terjadi dan menjadi paradoks (berlawanan) di satu sisi dan dibenci di sisi lain. Ini menunjukkan bahwa penjara tidak lagi menakutkan para pelaku tindak pidana.[[49]](#footnote-49)

Pengaturan mengenai pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Menurut Pasal 12 Ayat (1) KUHP, hukuman penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. P. A. F. Lamintang berbicara lebih jauh tentang definisi pidana penjara, mengatakan bahwa itu adalah suatu pidana yang menghalangi seorang terpidana untuk bergerak dan dilakukan dengan menutupnya di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.[[50]](#footnote-50) Dengan memaksa seseorang untuk mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, termasuk tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan umum. Namun, Roeslan Saleh menyatakan bahwa di antara pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara adalah yang paling signifikan. Penjara bisa seumur hidup atau untuk sementara waktu.[[51]](#footnote-51) Kemerdekaan diambil dari seseorang juga berarti kemerdekaan berusaha, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial ekonomi keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, pidana penjara pada dasarnya adalah keputusan hakim yang memaksa seorang terpidana untuk kehilangan kemerdekaannya untuk tinggal di lembaga pemasyarakatan. Di mana hal ini dapat menyebabkan stigma masyarakat bahwa seseorang yang menjalani hukuman penjara adalah orang yang jahat dan harus dijauhi. Penjara dibedakan menjadi seumur hidup atau selama waktu tertentu, menurut pengertian Pasal 12 ayat (1) KUHP, yang menunjukkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dengan demikian, perbedaan jenis pidana penjara dapat dilihat dari variasi waktunya.

1. Penjara Waktu Tertentu

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa pidana penjara selamawaktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Lebih lanjut pengaturan mengenai pidana penjara selama waktu tertentu dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa: Pasal 12 ayat (3) KUHP:

“Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditemukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N 1958 Nomor 187).”

Pasal 12 ayat (4) KUHP:

“ Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.”

Para ahli hukum menyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara waktu tertentu adalah untuk memberikan rehabilitasi kepada terpidana agar dapat kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Ini berbeda dengan pidana seumur hidup yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dari individu yang dianggap berbahaya.

1. Penjara Seumur Hidup

Penjara seumur hidup adalah hukuman yang pasti *(definite sentence*) karena hukuman diberikan kepada terpidana dengan jangka waktu yang pasti *(a definite period of time)*, yaitu menjalani hukuman selama seseorang masih hidup atau sampai dia meninggal dunia. Pidana penjara seumur hidup seperti halnya pidana mati yaitu merupakan sanksi pidana yang bersifat absolut**.** Penjara seumur hidup adalah hukuman yang pasti (*definite sentence*) karena hukuman diberikan kepada terpidana dengan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani hukuman selama seseorang masih hidup atau sampai dia meninggal dunia.[[52]](#footnote-52) Pada dasarnya, pidana penjara seumur hidup merupakan penghapusan hak kebebasan seseorng, terlepas dari kenyataan bahwa individu tersebut telah melakukan tindakan pidana yang merugikan atau membahayakan masyarakat.

Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), istilah pidana penjara seumur hidup sering menimbulkan pertanyaan. Masyarakat mempertanyakan durasi hukuman penjara seumur hidup. Menurut beberapa pendapat, jangka waktu pidana seumur hidup adalah total usia terpidana saat dia dijatuhi hukuman, atau sampai dia meninggal dunia. Banyak yang salah memahami bahwa hukuman seumur hidup berarti sesuai dengan usia terpidana pada saat vonis. Namun, Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun, yang menegaskan bahwa seumur hidup berarti sepanjang hidup terpidana.

Pidana penjara seumur hidup sering dibandingkan dengan pidana mati. Keduanya merupakan jenis hukuman terberat, tetapi dengan perbedaan mendasar dalam pelaksanaannya. Pidana mati mengakhiri kehidupan terpidana, sedangkan pidana seumur hidup memungkinkan terpidana menjalani kehidupan di penjara hingga meninggal. Hukuman pidana penjara seumur hidup dalam KUHP lama adalah bentuk sanksi yang menuntut terpidana untuk menjalani masa hukumannya sepanjang sisa hidupnya. Ini merupakan langkah tegas dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani kejahatan berat dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Ahli Hukum Roeslan Saleh dan Achmad Ali mengatakan bahwa hukuman penjara seumur hidup berarti seorang tahanan menjalani hukuman selama hidupnya, tanpa termasuk eksekusi mati oleh pemerintah. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, yang akan berlaku pada 2026, mengubah definisi hukuman penjara seumur hidup.

Menurut KUHP yang baru, hukuman penjara dapat dilakukan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dengan batas waktu paling lama 15 tahun atau paling singkat satu hari, kecuali ada ketentuan minimum. Bisa dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun jika ada pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau jika ada pemberatan pidana penjara selama 15 tahun. Namun, pidana penjara tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jika narapidana menjalani pidana penjara seumur hidup selama minimal 15 tahun, bisa diubah menjadi 20 tahun setelah pertimbangan Mahkamah Agung dan keputusan Presiden.[[53]](#footnote-53)

1. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana di Indonesia, yang mengalami perubahan signifikan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan yang baru. Pidana denda termasuk dalam kategori pidana pokok yang paling ringan dalam sistem KUHP lama, berada di urutan terakhir setelah pidana mati dan pidana penjara.[[54]](#footnote-54) Penjatuhan pidana denda sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh hakim, khususnya di sistem peradilan Indonesia. Pidana denda ditetapkan dengan batas maksimum yang spesifik untuk masing-masing pasal, tetapi seringkali dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, batas maksimum denda sering kali dianggap terlalu rendah untuk menciptakan efek jera.[[55]](#footnote-55)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, denda tertinggi dalam beberapa pasal hanya mencapai Rp150.000 sebelum penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dijelaskan bahwa pidana denda telah diperbarui dengan sistem kategori yang lebih jelas. Pidana denda kini ditentukan berdasarkan kategori dengan batas minimum dan maksimum yang lebih tinggi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp50 miliar, tergantung pada kategori tindak pidana. Perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana melalui penyesuaian nilai denda dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Dengan sistem kategori yang lebih jelas dan batasan yang lebih tinggi, diharapkan pidana denda dapat berfungsi sebagai alat pemidanaan yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia.

1. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana pelanggaran di Indonesia. Hukuman ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki beberapa karakteristik serta perbedaan signifikan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan untuk pelanggaran yang lebih ringan, dengan durasi hukuman paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun. Dalam kasus tertentu, jika pelanggaran dilakukan berulang kali, durasi dapat diperpanjang hingga satu tahun empat bulan, Durasi hukuman ini tentunya bergantung pada kasus atau tindakan narapidana. Semakin berat kasus tersebut, lebih lama hukumannya.[[56]](#footnote-56)

Dalam revisi terbaru KUHP, terdapat perubahan signifikan terkait pidana kurungan. Menurut Pasal 615 UU Nomor 1 Tahun 2023, pidana kurungan telah dihapuskan sebagai bentuk hukuman pokok. Sebagai gantinya, pelanggar dapat dikenakan pidana denda. Jika sebelumnya seorang pelanggar tidak mampu membayar denda, mereka dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan; kini pilihan tersebut tidak lagi tersedia. Dengan demikian, pemahaman mengenai pidana kurungan penting untuk mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia menangani pelanggaran ringan dibandingkan dengan kejahatan berat.

1. Pidana Tutupan

Hukum pidana Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946, mengatur jenis hukuman yang dikenal sebagai pidana tutupan. Salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terpidana adalah pidana tutupan. Pidana ini dianggap sebagai hukuman yang tidak bersifat penjara, tetapi lebih kepada pengawasan atau pembatasan kebebasan terpidana, meskipun KUHP lama atau KUHP Baru tidak memberikan definisi yang jelas.[[57]](#footnote-57) Pidana tutupan sangat terbatas dalam praktik peradilan Indonesia, meskipun diatur secara hukum.

Jenis hukuman ini jarang digunakan sejak diperkenalkan, dan banyak ahli hukum meragukan keefektifannya dalam praktik pemidanaan kontemporer. Pidana tutupan tetap menjadi salah satu sanksi utama dalam RUU KUHP yang baru, meskipun ada kritik yang menyatakan bahwa itu dapat menyebabkan diskriminasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

1. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang ditambahkan ke pidana pokok yang dijatuhkan dan tidak dapat dijatuhkan sendiri kecuali dalam kasus tertentu dalam perampasan barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, yang berarti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati, ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana pokok berbeda dengan ketentuan yang berkaitan dengan pidana tambahan ini. Ketentuan tersebut yaitu;[[58]](#footnote-58)

* Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok; tidak boleh dijatuhkan sebagai satu pidana.
* Hanya apabila dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, yang berarti bahwa suatu perbuatan pidana tidak diancamkan, maka pidana tambahan dapat dijatuhkan.
* Hanya diancamkan untuk beberapa pelanggaran tertentu, bukan semua jenis pelanggaran.
* Walaupun diancamkan secara eksplisit dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, sifat pidana tambahan ini mungkin ada. Artinya, itu diputuskan oleh hakim untuk menjatuhkannya.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif, sifat preventifnya menonjol karena sifat pidananya sering hilang. Kemungkinan mendapat grasi juga sering dikaitkan dengan risiko tambahan.

1. Pencabutan Hak Tertentu

“Menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilan adalah

1. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
2. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjalankan mata pencarian terterntu
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri.”

“Menurut Pasal 38 (1) KUHP, hakim bertanggung jawab untuk menentukan berapa lama hak tersebut dicabut”

1. Pencabutan berlaku seumur hidup untuk hukuman mati atau penjara seumur hidup
2. Pencabutan pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan harus lebih lama dari dua tahun dan paling lama lima tahun dari pidana utama.
3. Pencabutan pidana paling sedikit dua tahun dan tidak boleh lebih dari lima tahun.”

Hak tersebut dicabut pada hari putusan hakim dapat diterapkan. Jika aturan khusus menetapkan bahwa penguasa lain harus memecat seorang pejabat, hakim tidak dapat memecatnya.

1. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu merupakan bentuk pidana tambahan dalam hukum pidana Indonesia, diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana ini hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, kecuali dalam kasus tertentu seperti pada anak di bawah umur. Mekanisme perampasan dapat dilakukan melalui proses hukum pidana, dimana barang harus disita terlebih dahulu sebelum perampasan dilakukan.[[59]](#footnote-59) Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda.Pasal 39 KUHP mengatur perampasan barang tertentu, yaitu:

1. Barang-barang yang dimiliki terpidana yang diperoleh dari tindakan kriminal atau sengaja digunakan untuk melakukan tindakan kriminal dapat dirampas.
2. Putusan perampasan dapat dijatuhkan dalam kasus pemidanaan karena pelanggaran atau kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan barang dapat dilakukan terhadap orang yang salah dan kemudian diserahkan kepada pemerintah.

Jika barang tersebut tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar menurut taksiran yang diputuskan oleh hakim, perampasan barang yang tidak disita sebelumnya akan mengakibatkan pidana kurungan. Kurungan pengganti berlaku selama paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Jika barang yang dirampas diserahkan, kurungan pengganti ini juga dihapus. Dalam KUHP lama, subjek hukum pidana hanya mengenal individu, sehingga pasal biasanya dimulai dengan kata "barangsiapa". Namun, dalam KUHP baru, subjek pidana dapat berupa korporasi atau bahkan individu[[60]](#footnote-60) Pasal 66 dan 64 KUHP baru mengatur perampasan barang tertentu. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana tambahan mencakup perampasan barang tertentu atau tagihan, sedangkan Pasal 64 menjelaskan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan, termasuk pidana pokok dan tambahan. Barang yang dapat dirampas termasuk barang yang digunakan dalam tindak pidana atau yang dibuat khusus untuk tujuan itu.

1. Pengumuman putusan hakim

Dalam sistem hukum Indonesia, pidana tambahan terdiri dari berbagai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pengumuman keputusan hakim merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengumuman putusan hakim merupakan sanksi tambahan yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tertentu. Hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok yang diatur dalam rumusan pasal tindak pidana dalam KUHP.[[61]](#footnote-61) Tujuan dari sanksi ini adalah untuk membuat pelaku dan masyarakat jera. Dengan mengumumkan keputusan hakim, pelaku diharapkan merasa malu dan reputasinya terganggu, sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi.

Pengumuman putusan hakim ini juga berfungsi sebagai pencegahan umum agar masyarakat lebih waspada terhadap kejahatan. Pengaturan mengenai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, mencakup beberapa aspek penting terkait dengan pengumuman putusan hakim sebagai bentuk sanksi tambahan. Diharapkan pengumuman keputusan hakim sebagai pidana juga akan membantu masyarakat belajar dan mencegah stigma negatif terhadap pelaku kejahatan.[[62]](#footnote-62) Pengaturan mengenai pidana tambahan dalam KUHP baru mencerminkan upaya untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan memiliki potensi besar untuk mencegah kejahatan, masih diperlukan pengaturan dan penerapan yang lebih baik agar dapat berfungsi secara efektif dalam praktik hukum.

## Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan mekanisme yang dirancang untuk mengontol dan menangani kejahatan atau sebuah tindak pidana melalui berbagai lembaga penegak hukum. Mardjono Reksodipoetro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengontrol kejahatan, yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan Terpidana.[[63]](#footnote-63) Romli Atmasasmita menambahkan bahwa sistem ini juga mencakup mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan, dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi antar komponen.[[64]](#footnote-64) Ruang lingkup sistem ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari penegakan hukum hingga rehabilitasi pelanggar hukum. Komponen dalam sistem peradilan pidana mencakup:

#### **Kepolisian**

Bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan kejahatan; polisi adalah garda terdepan penegakan hukum, melakukan pengumpulan bukti, dan menangkap tersangka. Tugas pokok dan kewenangan kepolisian dalam sistem peradilan pidana (SPP), diatur dalam pasal 13, 15, 32 dan 37 Undag-Undang Nomor 2 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **Kejaksaan**

Memiliki peran yang signifikan dalam penuntutan kasus pidana. Jaksa bertanggung jawab untuk menilai bukti yang dikumpulkan oleh polisi dan memutuskan apakah akan melanjutkan kasus ke pengadilan. Selain itu, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Tugas dan kewenangannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **Pengadilan**

Pengadilan bertanggung jawab untuk menjamin proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat mengadili kasus pidana berdasarkan bukti yang disajikan oleh jaksa dan pembelaan terdakwa**.** Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan nasihat, pertimbangan, dan keterangan hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengatur tugas pokok dan kewenangan pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### **Lembaga Pemasyarakatan**

Berfungsi untuk menghukum orang yang melanggar undang-undang yang telah diputuskan bersalah. Selain itu, lembaga ini membantu narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat. Tugas pokok dan kewenangannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial. Pendekatan normatif menganggap kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Pendekatan administratif melihat keempat lembaga penegak hukum sebagai organisasi manajemen dengan mekanisme kerja horizontal dan vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Sistem administrasi adalah sistem yang digunakan, sedangkan pendekatan sosial berpendapat bahwa keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ke gagalan dari mereka dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.[[65]](#footnote-65) Keempat subsistem tersebut merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana yang lengkap. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (yang selanjutnya disebut KUHAP), Sistem Peradilan Pidana Terpadu didirikan di atas prinsip "diferensiasi fungsional" antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang[[66]](#footnote-66)

Sistem peradilan di Indonesia merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sistem peradilan di Indonesia berlandaskan pada Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, mengatur sepenuhnya fungsi kekuasaan kehakiman ini.[[67]](#footnote-67)Di Indonesia, Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman. Badan peradilan lain di bawah komando Mahkamah Agung termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Lembaga-lembaga tersebut berperan menjaga keadilan dan menghindari intervensi dari legislatif, eksekutif, dan lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan konsep pengadilan. Peradilan menunjukan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Tujuan utama sistem peradilan pidana (SPP) adalah untuk menciptakan tatanan sistem yang efektif yang berjalan sesuai rel yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan ini, sistem SPP harus memiliki landasan, baik *Ground Norm* maupun *Ground Program*. Berikut adalah asas-asas yang menjadi landasan dasar sistem peradilan pidana;[[68]](#footnote-68)

1. “ Asas prioritas (*Priority Principle*) yaitu asas dasar yang memaksa sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti menyelesaikan kasus yang dianggap membahayakan masyarakat atau yang sangat penting. Asas ini berasal dari sistem peradilan pidana yang semakin berat sementara kondisi kejahatan cenderung meningkat. Di sini, prioritas tidak hanya terkait dengan berbagai kategori tindak pidana, tetapi juga tindak pidana dalam kategori yang sama dan pemilihan jenis tindakan atau pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku.”
2. “ Asas kelayakan atau kegunaan (*Expediency Principle*) yaitu asas dasar yang mengatakan bahwa sistem peradilan pidana harus menyeimbangkan hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sistem ini dimulai dengan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan itu layak dan bermanfaat untuk dilakukan sehingga terlihat lebih banyak keuntungan daripada kerugian.”
3. “ Asas legalitas yaitu asas dasar yang membentuk sistem peradilan pidana dan menjamin bahwa sistem tidak dapat berfungsi tanpa dasar hukum tertulis. Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, yang dapat didefinisikan sebagai kepentingan tata tertib hukum, sistem peradilan pidana hanya dapat menangani dan mengelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan hukum yang telah ditetapkan dan telah dilanggar.”
4. “ Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*) Menurut asas ini, sistem peradilan pidana menjalankan dan melaksanakan hukum berdasarkan proporsi antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepantingan korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana menilai seberapa jauh penerapan hukum masuk akal dan mencapai tujuan yang diinginkan.”
5. “ Asas kesamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*) dasar bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama di muka hukum, tanpa pilih kasih. Dengan demikian, sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga setiap subyek hukum yang menginginkan pelayanan dalam penyelesaian masalah hukum harus dilayani dengan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, tanpa mengutamakan atau mendahulukan.”
6. “ Asas Subsidair (*Subsidairity Principle*) asas ini menyatakan bahwa penerapan hukum pidana adalah metode utama dalam menanggulangi kejahatan, dengan sanksi hanya sebagai alternatif kedua. Dengan demikian, sistem peradilan pidana hanya dapat menerapkan hukum pidana jika tidak ada pilihan lain, tetapi jika ada metode lain untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana harus dihindari.”

Sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menanggapi tantangan modern, termasuk penanganan tindak pidana korupsi dan penyesuaian terhadap perubahan sosial serta hukum. Beberapa undang-undang baru telah diperkenalkan untuk memperbaiki mekanisme hukum acara agar lebih responsif terhadap dinamika kejahatan.[[69]](#footnote-69) Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Indonesia berupaya untuk menjadi lebih adil dan transparan, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan sosial melalui penegakan hukum yang efektif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHP baru memperkenalkan konsep pemidanaan yang lebih komprehensif, termasuk tujuan pemidanaan yang mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia[[70]](#footnote-70) Jenis pidana kini lebih beragam, mencakup pidana kerja sosial dan pengawasan, serta memperkenalkan sanksi yang lebih proporsional.

# 

# 

1. Hukum online, https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/, Diakses pada 12 Oktober 2024 Pukul : 14.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Dede Karnia, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Gunung Djati Bandung, 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka [↑](#footnote-ref-3)
4. Diah Gustiniati Maulani, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Kholiq, Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia [↑](#footnote-ref-5)
6. Ikhwan Nur Mustofa. “Pidana Seumur Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 [↑](#footnote-ref-6)
7. Moelyatno dalam Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 4 [↑](#footnote-ref-7)
8. Linda Ikawati,” Analisis Mengenai Peraturan Dan Pelaksnaan Pidana Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, EconomicAnd Legal Theory.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Kompas.com, https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/11/103000365/sederet-orang-yang-divonis-penjara-seumur-hidup-ada-sambo-dan-mantan-ketua?page=all, Diakses pada: 12 Oktober 2024 Pukul : 14.30 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* kompas.com [↑](#footnote-ref-10)
11. Tempo.co,<https://nasional.tempo.co/amp/1682360/dari-ketua-mk-hingga-teroris-inilah-sederet-narapidana-yang-divonis-penjara-seumur-hidup>, Diakses pada: 25 Oktober 2024 Pukul: 16.00 WIB [↑](#footnote-ref-11)
12. Tirto.id. <https://tirto.id/daftar-pelaku-kasus-vina-cirebon-2016-dan-masa-hukumannya-gYEL> Diakses pada 9 Januari 2025 Pukul 20.35 WIB [↑](#footnote-ref-12)
13. Fenwick, *et.al* (2016), “*The ShiftingMeaning of Legal Certainty”.* Singapura: *Spinger.* hlm. 1-6 [↑](#footnote-ref-13)
14. Henny C. Kamea, “*Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*” , 2013 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ikhwan Nur Mustofa, *“Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dwi Ade Surya. “Efektifitas Penerapan Pidana Penjara Seumur Hidup Tehadap Nilai-nilai Kemanusiaan”. Skripsi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. Syachdin,SH. “Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistim Hukum Pidana Nsional”. Tesis Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009 [↑](#footnote-ref-17)
18. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm.5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Achmad Irwan Hamzani, Buku Panduan Skripsi, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2023, Hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1,2008, hlm.19 [↑](#footnote-ref-20)
21. Achmad Irwan Hamzani, *Buku Panduan Skripsi,* Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2023, Hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-21)
22. Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum,*Kencana Pranata Media Group,Jakarta, 2008, Hlm 93. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sugiyono. (2016: 225 ). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta. [↑](#footnote-ref-23)
24. Jhonny Ibrahim, *“ Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif “ , Malang: Bayu Media Publising, 2012, hlm. 392.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bambang Poernomo,Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,1982, hal. 86 [↑](#footnote-ref-26)
27. Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ke enam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8. [↑](#footnote-ref-27)
28. Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I,* Sinar Grafik, Jakarta, hlm.224. [↑](#footnote-ref-28)
29. P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* sinar grafika, hlm.1-2. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-30)
31. Fransiska Novita Eleanora, “*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*”, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No. 2 April 2012 [↑](#footnote-ref-31)
32. P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193-194 [↑](#footnote-ref-32)
33. Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1 [↑](#footnote-ref-33)
34. D Dollini Rifandhy *“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021 [↑](#footnote-ref-34)
35. Chairul Huda, 2006. “*Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.” Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Bandung, Alumni,2005 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid* hlm.6 [↑](#footnote-ref-37)
38. Mochammad Januar Rizki, *Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional.* Di akses dari [https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a203 6/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a203%206/) , Pada Selasa, 10 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-39)
40. Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

    hal. 14 [↑](#footnote-ref-40)
41. Rizqi Mely Trimiati dan Mitro Subroto, Pidana Seumur Hidup Dalam Dimensi Sistem Pemasnyarakatan, *Supremasi Jurnal Hukum VOL.04, No.1* [↑](#footnote-ref-41)
42. Fatahilla, Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 17 September 2009. [↑](#footnote-ref-42)
43. Arvandi Rahmansyah,”Pergeseran Pidana Mati Sebagai Pidana Pokok Menjadi Pidana Eksepsional Dalam KUHP baru”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024 [↑](#footnote-ref-43)
44. Bismar Siregar, “*Islam dan Hukum”*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-44)
45. Wirjono Projodikoro. Op cit., hlm. 175 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid.,* hlm.176 [↑](#footnote-ref-46)
47. Amirudin, *Mekanisme Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2011. [↑](#footnote-ref-47)
48. Lidya Suryani Widayati, *“Pidana Mati Dalam RUU KUHP:Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?”,* [*https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930*](https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930)*, 2016* [↑](#footnote-ref-48)
49. Dr.Siswanto S.H.,M.H “Paradoks Pidana Penjara” Artikel Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, <https://fh.upstegal.ac.id/?p=17513>, Diakses pada 23 Desember 2024 pukul 22:30 WIB [↑](#footnote-ref-49)
50. P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,*Armico, Bandung, 1988, hlm.69. [↑](#footnote-ref-50)
51. Roeslan Saleh, 1987, “ *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru”*, Jakarta, hlm. 62. [↑](#footnote-ref-51)
52. Marwan Supandi,S.H. “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Di Sertai Dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru,2021 [↑](#footnote-ref-52)
53. Muhammad Zakir *et.al.,” Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Hukum&Hukum Islam Vol. 11 No. 2 Juni 2024 [↑](#footnote-ref-53)
54. Selfina Susim, “Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP” Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 [↑](#footnote-ref-54)
55. I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, “*Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*,” Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010 [↑](#footnote-ref-55)
56. HUKUMKU, <https://www.hukumku.id/post/perbedaan-penjara-dan-kurungan> , Diakses pada 28 Desember 2024 Pukul 23.30 WIB [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-57)
58. Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-58)
59. Surya Hadi Purnama*“Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana”* Artikel DJKN Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021 [↑](#footnote-ref-59)
60. BP LAWYERS COUNSELORS AT LAW, <https://bplawyers.co.id/2023/01/04/rkuhp-disahkan-apa-saja-yang-baru-terhadap-ketentuan-pemidanaan-di-indonesia/> Diakses pada: 31 Desember 2024 Pukul : 21.00 WIB [↑](#footnote-ref-60)
61. Mr.Drs.E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hlm. 341 [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad Ibnu Prarista, *“Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim: Antara Eksistensi dan Urgensi Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta,2023 [↑](#footnote-ref-62)
63. Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993, hal. 1 [↑](#footnote-ref-63)
64. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme,* Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14 [↑](#footnote-ref-64)
65. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7 [↑](#footnote-ref-65)
66. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-66)
67. Tuti Harwati, M.AG, “*Peradilan di Indonesia”* Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Mataram Desember 2015 [↑](#footnote-ref-67)
68. Rusli Muhamad, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Publisher*”:Yogyakarta : UII Press, 2018 [↑](#footnote-ref-68)
69. Erna Dewi, Firganefi, S.H., M.H., “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Dinamika dan Perkembangan); Edisi 2,* Graha Ilmu 2014 [↑](#footnote-ref-69)
70. Mochamad Januar Rizki, “*Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional ”*, Diakses pada 6 Januari 2025 Pukul 13.30 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/> [↑](#footnote-ref-70)